

Pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat, ketergantungan pemerintah daerah, opini audit dan temuan audit terhadap *audit delay*

Yogyaria Astin Kartika Gemilang¹, Yulinda Devi Pramita^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: yulinda.feb@ummgl.ac.id

DOI: 10.31603/bacr.4895

Abstract

This study aims to analyze the effect of government size, dependence on governmental grants, audit opinion, and audit findings on audit delay. This research was conducted because there was an increase in audit delay. The samples of this study were audit reports of provincial government from 2015 to 2019. The obtained data were 167. The data collection method used in this study was purposive sampling. This study used multiple linear regression analysis. The results of this study showed that government size and dependence on governmental grant had no significant effect on audit delay, while audit opinion and audit findings had a positive and significant effect on audit delay. Because there were a limitation on samples and variables, the further research is expected to add and take different samples and variables so the results will be more representative.

Keywords: *Audit Delay; Government Size; Dependence on Governmental Grants; Audit Opinion; Audit Findings*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap *audit delay*. Penelitian ini dilakukan karena masih terjadi peningkatan *audit delay*. Sampel dalam penelitian adalah laporan hasil pemeriksaan pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019. Total observasi dalam penelitian ini adalah 167. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Model penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit dan temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Karena terdapat keterbatasan pada sampel dan variabel, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah dan mengambil sampel dan variabel yang berbeda agar hasil lebih representatif.

Kata Kunci: *Audit Delay; Ukuran Pemerintah; Ketergantungan pada Hibah Pemerintah; Opini Audit; Temuan Audit*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan dapat digunakan untuk memenuhi dan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas bagi semua pihak yang berkepentingan serta dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, tidak terkecuali laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah harus memiliki empat karakteristik kualitatif sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), yaitu relevan, dapat dipahami, andal dan dapat dibandingkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pada sektor pemerintah, ketepatan waktu laporan keuangan mempunyai peran penting untuk mengambil keputusan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan mengenai ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD harus diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah LKPD diterima oleh BPK.

Penerbitan laporan keuangan setiap pemerintah daerah sering kali bervariasi. Terjadi beberapa kasus terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh beberapa pemerintah daerah. Hal ini dapat menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan audit oleh BPK. Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (www.bpk.go.id), pada tahun 2014 jumlah keterlambatan penyampaian LKPD adalah sebanyak 35 pemerintah daerah (6,5%). Pada tahun 2015, jumlah keterlambatan menurun menjadi 9 (1,6 %), sedangkan pada tahun 2016 jumlah keterlambatan sebanyak 5 (0,9%). Pada tahun 2017 dan 2018, semua pemerintah daerah telah menyampaikan LKPD dengan tepat waktu. Pada tahun 2019, terdapat 1 pemerintah daerah (0,18%) yang terlambat menyampaikan LKPD. Keterlambatan penyampaian LKPD oleh pemerintah daerah kepada BPK dapat menimbulkan opini negatif terhadap kinerja tata kelola keuangan daerah. Selain itu, hal ini juga dapat memperlambat pemerintah daerah tersebut menerima hasil audit BPK dan dapat berimbas terhadap dana perimbangan atau dana alokasi umum (DAU). Penurunan keterlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah karena adanya peraturan yang mengatur mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, yaitu Permendagri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Auditor diharapkan dapat meminimalkan *audit delay* untuk memenuhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Payne & Jensen (2002) mendefinisikan *audit delay* sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan penyelesaian laporan audit keuangan. *Audit delay* merupakan rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31

Desember) sampai tanggal diterbitkannya laporan oleh auditor. Carlaw & Kaplan (1991) juga menambahkan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kapan dimulai dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan audit tersebut.

Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (www.bpk.go.id), rata-rata *audit delay* pada pemerintah provinsi juga bervariasi. Pada tahun 2015, rata-rata *audit delay* adalah 150 hari dengan jumlah empat pemerintah provinsi yang melebihi *audit delay* yang ditentukan. Pada tahun 2016, rata-rata *audit delay* adalah 149 hari dengan jumlah tiga pemerintah provinsi yang melebihi *audit delay* yang ditentukan. Pada tahun 2017, rata-rata *audit delay* pemerintah provinsi 142 hari, dengan jumlah satu pemerintah provinsi yang melebihi *audit delay* yang ditentukan. Pada tahun 2018, rata-rata *audit delay* adalah 141 hari, dengan jumlah dua pemerintah provinsi yang melebihi *audit delay* yang ditentukan. Pada tahun 2019, rata-rata *audit delay* meningkat menjadi 162 hari, dengan jumlah 24 pemerintah provinsi yang melebihi *audit delay* yang ditentukan.

Meskipun penelitian *audit delay* di sektor publik tidak sebanyak pada sektor swasta, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Purwaningsih (2016) tentang *audit delay* menunjukkan hasil bahwa nilai APBD berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, total aset dan latar belakang pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, pada penelitian Rianti (2019) menemukan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Hardini *et al.* (2016) tentang *audit delay* menemukan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran daerah dan opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Syahyuni *et al.* (2018) menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran pemerintah, sedangkan opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap *audit delay*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sehingga LKPD dapat disampaikan kepada BPK dengan tepat waktu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemeriksa BPK dalam membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat membuat kinerja lebih optimal.

2. Metode

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah pemerintah provinsi. Sampel penelitian diambil berdasarkan metode *purposive sampling*. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi, menyajikan LKPD tahun 2015-2019 yang telah diaudit oleh BPK dan menyajikan data lengkap. Kriteria eksklusif penelitian ini adalah pemerintah provinsi yang menyajikan LKPD tahun 2015-2019 tetapi tidak

memiliki data yang lengkap. Pemilihan pemerintah provinsi dalam penelitian ini dikarenakan permasalahan yang dimiliki lebih signifikan, kompleks, dan material. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK RI.

2.2. Variabel Penelitian

a. *Audit delay*

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal akhir tahun anggaran hingga tanggal diterbitkannya laporan audit oleh auditor (Carslaw & Kaplan, 1991). *Audit delay* diukur dari jumlah hari dari tanggal berakhirnya tahun buku anggaran pemerintah daerah (31 Desember) sampai tanggal diterbitkannya laporan audit.

b. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan suatu gambaran mengenai besar kecilnya suatu daerah (Rianti, 2019). Ukuran pemerintah daerah diukur dengan ukuran kuantitatif yaitu total aset yang dimiliki pemerintah daerah dan kemudian ditransformasikan ke logaritma natural (Cohen & Leventis, 2013). Hipotesis penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

c. Tingkat Ketergantungan Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan (Wibisono & Yuliana, 2012). Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rasio jumlah realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah dibagi dengan total pendapatan daerah (Muladi, 2014). Dalam hipotesis penelitian ini, tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

d. Opini Audit

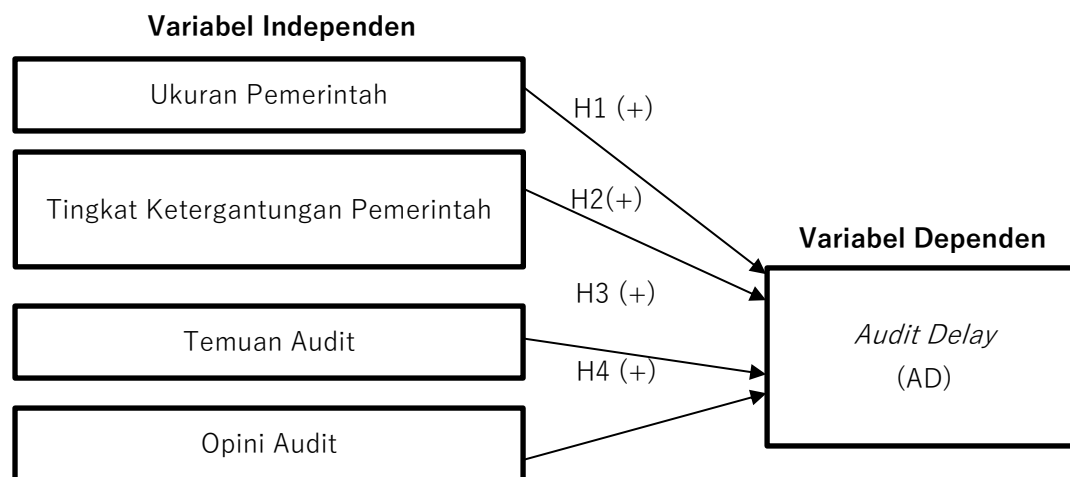
Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Akbar, 2013). Opini audit diukur dengan variabel *dummy*, yaitu pemerintah daerah yang menerima pendapat Wajar dengan Pengecualian (WDP) diberi kode 1 dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain WDP diberi kode 0 (Syahril & Yeni, 2019). Hipotesis penelitian ini adalah opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

e. Temuan Audit

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit (ISO 9000). Temuan audit diukur dengan jumlah temuan yang muncul dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI (Istniawan & Suranta, 2015). Penelitian ini mempunyai hipotesis bahwa temuan audit memiliki dampak positif terhadap *audit delay*.

f. Variabel Independen

Variabel independen dari penelitian ini terdiri dari ukuran pemerintah, tingkat ketergantungan pemerintah, temuan audit, dan opini audit. Gambar 1 menunjukkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini.



Gambar 1. Variabel Independen

2.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi) dan uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$AD = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 GRANT + \beta_3 OPINION + \beta_4 FINDINGS + e$$

AD	=	<i>audit delay</i>
α	=	konstanta
β	=	koefisien regresi
SIZE	=	logaritma natural dari total aset yang dimiliki pemerintah daerah
GRANT	=	rasio antara total pendapatan transfer pemerintah pusat dengan total pendapatan daerah dalam persen
OPINION	=	jenis opini yang diberikan oleh BPK, 1 untuk WDP, 0 untuk selain WDP
FINDINGS	=	jumlah temuan audit dalam LHP BPK
e	=	<i>standar error</i>

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Sampel Penelitian

Tabel 1 menunjukkan sampel penelitian. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia yang berjumlah 34. Penelitian ini menggunakan data selama lima tahun (2015-2019) sehingga data yang digunakan adalah 170. Dari 170 sampel tersebut, tiga di antaranya harus dikeluarkan dari sampel penelitian karena terdapat data yang tidak lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sampel penelitian akhir yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 167.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah provinsi di Indonesia	34
2.	Data pengamatan 5 tahun (2015-2019)	170
3.	Laporan keuangan yang tidak disajikan secara lengkap	(3)
4.	Sampel akhir	167

Sumber: data sekunder diolah, 2021

3.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji statistik untuk normalitas dengan uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebesar 0,192. Nilai tersebut lebih besar dari 0,050 ($p = 0,192 > 0,050$). Berdasarkan hasil nilai dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi mencukupi asumsi normalitas dan data telah terdistribusi dengan normal. [Tabel 2](#) menunjukkan hasil uji normalitas dari penelitian ini.

Tabel 2. Uji Normalitas

Standar Signifikansi	Nilai Signifikansi	Kesimpulan Hasil
0,050	0,192	Data berdistribusi normal

Sumber: data sekunder diolah, 2021

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai tolerance di atas 0,1 ($> 0,1$) dan nilai *variance inflation factor* (VIF) di bawah nilai 10 (< 10). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terdapat di dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. [Tabel 3](#) menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas penelitian ini.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Statistik Kolinearitas		Keterangan
	Tolerance	VIF	
SIZE	0,570	1,753	Tidak terjadi multikolinearitas
GRANT	0,583	1,716	Tidak terjadi multikolinearitas
OPINION	0,943	1,061	Tidak terjadi multikolinearitas
FINDINGS	0,917	1,091	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data sekunder diolah, 2021

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* yang ditunjukkan pada [Tabel 4](#) dapat disimpulkan bahwa semua variabel, yaitu SIZE, GRANT, OPINION, dan FINDINGS mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
SIZE	0,162	Tidak terjadi heteroskedastisitas

GRANT	0,070	Tidak terjadi heteroskedastisitas
OPINION	0,094	Tidak terjadi heteroskedastisitas
FINDINGS	0,598	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder diolah, 2021

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* yang ditunjukkan hasilnya pada Tabel 5 dengan nilai sebesar 1,802, nilai *du* sebesar 1,769, dan nilai *4-du* sebesar 2,204. Hasil tersebut memenuhi syarat $du < d < 4-du$ ($1,769 < 1,802 < 2,204$). Nilai *d* berada di antara nilai *du* dan *4-du*, yaitu nilai *d* lebih besar dari nilai *du* dan nilai *d* lebih kecil dari nilai *4-du*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi di antara variabel pada penelitian ini.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

d	dl	du	4-dl	4-du
1,802	1,698	1,796	2,302	2,204

Sumber: data sekunder diolah, 2021

e. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6 menunjukkan hasil uji regresi linear berganda. Adapun persamaan model yang dihasilkan adalah:

$$AD = 4,620 + 0,037SIZE + 0,016GRANT + 0,077OPINION + 0,067FINDINGS + e$$

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4,620	1,053			4,389	0,000
SIZE	0,037	0,287	0,012		0,130	0,897
GRANT	0,016	0,031	0,048		0,501	0,617
OPINION	0,077	0,029	0,198		2,652	0,009
FINDINGS	0,067	0,017	0,288		3,808	0,000

Sumber: data sekunder diolah, 2021

3.3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Melalui uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel 7. Diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 12,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen (*audit delay*) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (ukuran pemerintah daerah, tingkat pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit) adalah sebesar 12,7%. Nilai *adjusted R square* tersebut juga menunjukkan bahwa *audit delay* dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit sebesar 12,7%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 87,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,385	0,148	0,127	0,09344

Sumber: data sekunder diolah, 2021

b. Uji F

Melalui uji statistik F yang ditunjukkan pada Tabel 8. Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000, F hitung 7,051, dan F tabel 2,43. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit secara simultan terhadap *audit delay* adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F \text{ hitung } 7,051 > F \text{ tabel } 2,43$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit secara simultan terhadap *audit delay*.

Tabel 8. Uji Statistik F

F hitung	F tabel	Nilai Signifikansi
7,051	2,43	0,000

Sumber: data sekunder diolah, 2021

c. Uji t

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini. Penjelasan mengenai Tabel 9. Uji t dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) menunjukkan nilai signifikansi untuk ukuran pemerintah daerah adalah 0,897. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 0,130 lebih kecil dari nilai t tabel 1,974. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh secara signifikan variabel ukuran pemerintah daerah terhadap *audit delay*.
- 2) Variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah (*grant*) menunjukkan nilai signifikansi untuk tingkat ketergantungan pemerintah daerah adalah sebesar 0,617 yang berarti $(0,501) > \text{Nilai } t \text{ hitung sebesar } (0,501) < (1,974)$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap *audit delay*.
- 3) Variabel opini audit (*opinion*) menunjukkan nilai signifikansi opini audit adalah sebesar 0,009. Nilai signifikansi tersebut berada di bawah 0,05. Nilai t hitung $(2,652) > \text{nilai } t \text{ tabel } (1,974)$. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif opini audit terhadap *audit delay* yang berarti hipotesis 3 diterima.

Variabel temuan audit (*findings*) menunjukkan nilai signifikansi temuan audit adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,808 > 1,974$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Dengan demikian, hipotesis 4 diterima.

Tabel 9. Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
SIZE	0,130	1,974	0,897	H1 tidak diterima
GRANT	0,501	1,974	0,617	H2 tidak diterima

OPINION	2,652	1,974	0,009	H3 diterima
FINDINGS	3,808	1,974	0,000	H4 diterima

Sumber: data sekunder diolah, 2021

3.4. Pembahasan

a. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit delay*

Menurut hasil penelitian, ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan pada kemungkinan lamanya *audit delay*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [Muladi \(2014\)](#) dan [Istniawan & Suranta \(2015\)](#) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Ukuran pemerintah daerah dianggap tidak bisa dijadikan tolok ukur mengenai lama atau tidaknya *audit delay* karena banyaknya transaksi yang mungkin terjadi tidak mempengaruhi pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu, pemerintah daerah dengan total aset yang besar maupun kecil memiliki tekanan yang sama untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BPK secara tepat waktu.

b. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap *Audit delay*

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Syahyuni et al. \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi tidak selalu menyebabkan *audit delay* semakin lama. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki kesadaran yang sama terhadap peraturan pemerintah untuk patuh dan menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu, yaitu maksimal tiga bulan setelah tahun akhir anggaran. Selain itu, pemeriksa juga menerapkan profesionalisme dalam melakukan audit pemerintah daerah.

c. Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit delay*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh positif opini audit terhadap *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian [Carslaw & Kaplan \(1991\)](#) dan [Payne & Jensen \(2002\)](#) yang membuktikan bahwa *audit delay* yang lebih lama dialami oleh pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Opini WDP dapat mengindikasikan terdapat prosedur tambahan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini dapat mengakibatkan semakin lama *audit delay* yang terjadi.

d. Pengaruh Temuan Audit terhadap *Audit delay*

Menurut hasil penelitian, temuan audit berpengaruh secara positif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [Wafa & Nugraeni \(2018\)](#) serta [Putro \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa temuan audit dapat meningkatkan *audit delay*. Menurut [Cohen & Leventis \(2013\)](#) terjadi komunikasi yang lebih lama antara auditee dengan auditor ketika terjadi permasalahan akuntansi yang bersifat material. Temuan audit tersebut harus dikomunikasikan kepada *auditee* agar mendapatkan klarifikasi, tanggapan, dan jawaban atas

temuan tersebut. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan menjadi lebih lama dan dapat menyebabkan semakin lamanya *audit delay*.

4. Kesimpulan

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah berpengaruh terhadap *audit delay*, namun penelitian ini tetap membuktikan opini audit dan temuan audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sampel penelitian yang digunakan adalah pemerintah provinsi tahun 2015-2019 dan menggunakan empat variabel independen yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya sehingga dapat menggeneralisasi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor *audit delay*.

Referensi

- Akbar, B. (2013a). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep & Teori*. Jakarta: CV Bumi Metro Raya.
- Carlsaw, C.A.P.N., dan Kaplan, S.E. (1991). An Examination of *Audit delay*: Further Evidence from New Zealand. *Accounting and Business Research*.
- Cohen, S. & Leventis, S.(2013). Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on *Audit delay*. *Accounting Forum*.
- Hardini, Z. G., Sukirman, S. (2016). Analisis Determinan *Audit delay* Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Indonesia. *Journal of Economic Education*.
- Istniawan, A. M., & Suranta, S. (2015). Audit Report Lag Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Indonesia. *Snema* (c).
- Muladi, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit delay* Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Payne, J.L., & Jensen, K.L. (2002). An Examination of Municipal *Audit delay*. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. (2006). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri NO. 13 Tahun 2006*.
- Putro, D. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Tipe Pemrintah Daerah, Temuan Audit, Dan Opini Auditor Terhadap *Audit delay* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

- Rianti, F. (2019). Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit Dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap *Audit delay*. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2(2): 87–97.
- Syahril, M., & Yeni N. S. (2019). The Influence of Government Size, Audit Opinion and Incumbent on *Audit delay* in the Provincial Government in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*.
- Syahyuni, I. E., Arza, F. I., & Afriyenti, M. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah, Dan Opini Audit Terhadap *Audit delay*. *Universitas Negeri Padang*.
- Wafa, Z., & Nugraeni, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit delay* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*.
- Wibisono, N., & Yuliana, L. (2012). Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat Pada Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur. *Ekomaks* 1.
- Wibowo, F.H., & Purwaningsih, E. (2016). Pengaruh Nilai APBD, Total Aset, Opini Audit, Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap *Audit delay* Pemerintah Daerah Di Subosukowonosraten. *Media Akuntansi - E-ISSN:- 93(13): 11–20*.
-